

KAITAN ANTARA ANIMO PETANI TERHADAP KELAPA SAWIT DENGAN PRODUKSI PADI DAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NUR IMDAH MINSYAH

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi

ABSTRAK

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan penyumbang terbesar dan lumbung padi bagi Provinsi Jambi. Pada tahun 2003 sumbangannya 150.515 ton atau 26,03%. Untuk bertahan sebagai penyumbang terbesar, kabupaten ini dihadapkan pada masalah tingginya animo petani terhadap kelapa sawit yang realisasinya dilakukan dengan menjadikan lahan pangannya menjadi kebun kelapa sawit. Tulisan ini bertujuan mendiskripsikan: (1) faktor-faktor Penyebab petani menjadikan lahan pangannya menjadi kebun kelapa sawit, dan; (2) perkiraan dampaknya terhadap produksi padi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Ada enam alasan yang menyebabkan petani telah dan akan mengalihkan sebagian atau seluruh lahan pangannya menjadi kebun kelapa sawit, yaitu: (1) produksi padi dan tanaman pangan lainnya rendah; (2) perawatan ringan; (3) meningkatkan taraf hidup (kesejahteraan) keluarga; (4) lahan pangan petani lain/tetangga telah dan akan ditanam dengan kelapa sawit; (5) hasil dan pendapatan lebih pasti, dan (6) sebagai penghasilan (tabungan) di hari tua. Persenyase total luas lahan pangan responden yang telah dan akan dialihkan menjadi kebun kelapa sawit mencapai 33,95 ha atau sebesar 34,22%.

Kata Kunci: Tanjung Jabung Timur, lumbung padi, Animo Petani, Kelapa Sawit.

PENDAHULUAN

Program pembangunan pertanian di Provinsi Jambi periode 2001 – 2005 difokuskan pada: (1) pengembangan sistem ketahanan pangan yang didasarkan pada kemampuan produksi, keragaman sumberdaya pangan serta kelembagaan dan budaya lokal, dan; (2) pengembangan sistem agribisnis (Disperta Provinsi Jambi, 2000). Ketahanan pangan itu sendiri dapat diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan baik dan harga terjangkau serta aman dikonsumsi oleh setiap warga untuk menopang aktivitas hidupnya (Saliem., Dkk. 2001).

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan penyumbang terbesar terhadap total produksi padi Provinsi Jambi. Sebagai contoh pada 2003 kabupaten ini memberikan sumbangan 150.515 ton atau 26,03%. Dengan besaran sumbangan ini tidak berlebihan bila Kabupaten Tanjung Jabung Timur berpredikat sebagai lumbung padi bagi Provinsi Jambi bersama sama dengan Kabupaten Kerinci.

Kedepan untuk bertahan sebagai kabupaten penyumbang terbesar terhadap total produksi padi Provinsi Jambi, kabupaten ini dihadapkan pada masalah tingginya animo petani terhadap kelapa sawit yang realisasinya dilakukan dengan cara menjadikan seluruh atau sebagian lahan pangannya menjadi kebun kelapa sawit. Bila tidak ada perbaikan teknik budidaya (teknologi) dan pencetakan areal tanam yang baru yang mampu mengkompensasi kehilangan hasil akibat alih fungsi tersebut, total produksi padi Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan berkurang yang juga berarti kontribusinya terhadap total produksi padi Provinsi Jambi juga akan berkurang.

Oleh karena itu, diketahuinya faktor-faktor penyebab beserta persepsi dan motivasi yang telah dan akan mengalihkan seluruh atau sebagian lahan pangannya menjadi kebun kelapa sawit adalah perlu seperti yang akan diuraikan dalam tulisan ini dan seterusnya dapat digunakan dalam menentukan langkah-langkah atau mengambil kebijakan dalam hubungannya dengan upaya tetap mempertahankan total produksi sekaligus penyumbang terbesar dan sebagai lumbung padi bagi Provinsi Jambi.

Tujuan

Tulisan ini bertujuan mendiskripsikan: (1) faktor-faktor yang menyebabkan petani mengalihkan seluruh atau sebagian lahan pangannya menjadi kebun kelapa sawit, dan; (2) perkiraan dampaknya terhadap produksi padi dan kesejahteraan petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

METODOLOGI

Data yang digunakan dalam tulisan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari sebagian data primer yang dikumpulkan dalam kegiatan Analisis (Kajian) Kebijakan Pengembangan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi yang dilaksanakan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jambi pada tahun 2004. Dalam Kegiatan pengkajian tersebut dipilih tiga kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 80 petani masing-masing 40 petani di empat desa (Harapan Makmur, Bandar Jaya, Rantau Rasau I, dan Bangun Karya) di Kecamatan Rantau Rasau dan 40 petani di tiga desa (Siau, Lambur I dan Lambur II) di Kecamatan Muara Sabak. Dua kabupaten lainnya adalah Kabupaten Merangin dan Kabupaten Batanghari. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dinas dan instansi serta data atau laporan penelitian lain yang relevan dengan tulisan ini. Pengolahan data dilakukan secara sederhana dan manual. Analisisnya berupa analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Wilayah dan Kondisi Lahan Usahatani

Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbentuk berdasarkan undang-undang Nomor 54 tanggal 4 Oktober tahun 1999 (Bappeda Tanjabtim, 2002). Sebelumnya wilayah kabupaten ini merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tanjung Jabung, yang oleh undang-undang tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Kabupaten Induk) dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hampir seluruh wilayah kabupaten ini merupakan lahan rawa pasang surut yang jenis tanahnya didominasi tanah gambut dan sulfat masam, yang proses pembentukannya di pengaruhi oleh gerakan pasang dan surutnya air laut (Ridho, ZR. 2004).

Selain dikelompokkan sebagai lahan marjinal, lahan pasang surut sangat labil, oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati dan didasarkan pada kaedah-kaedah konservasi, bila tidak dapat menyebabkan lahan menjadi rusak yang tidak layak untuk diusahakan

serta untuk mengembalikannya ke adaan semula (mendekati) disamping memerlukan waktu yang panjang juga memerlukan biaya yang relatif besar (Manwan, *dkk.* 1992).

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan/penurunan kualitas lahan, diantaranya: (1) pengolahan lahan yang kurang hati-hati; (2) terkurasnya unsur hara di dalam tanah akibat pemanfaatan terus-menerus dan berlangsung dalam jangka waktu lama tanpa diimbangi dengan pemberian pupuk (Setyorini 2002); (3) pembakaran lahan terutama pada awal musim tanam padi yang menyebabkan tanah mineral dan gambut terbakar dan kering tak balik.

Dari wawancara dengan 40 petani responden di Empat Desa (Rantau Rasau I, Harapan Makmur, Bandar Jaya, dan Bangun Karya) di Kecamatan Rantau Rasau dan 40 petani responden tiga desa (Siau, Lambur I dan Lambur II) di Kecamatan Muara Sabak, terungkap bahwa sebelum terjadinya kerusakan lahan karena terbakar dan pendalaman saluran air produksi padi berkisar antara 1,5 t/ha GKG – 2,5 t/ha GKG, hasil ini dapat mencukupi kebutuhan keluarga (4 – 6 jiwa) untuk jangka waktu 10 – 12 bulan, setelah kebakaran lahan dan pendalaman saluran air tersebut, terutama dalam kisaran waktu 1 -3 tahun produksinya sangat rendah yaitu 0,00 t/ha GKG – 0,5 t/ha/GKG (Alihamsyah, *dkk.*, 2000).

Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, petani dan anggota keluarganya yang telah memasuki usia kerja (≥ 15 tahun), mencari pekerjaan di luar desa baik yang masih berada dalam masing-masing kecamatan, maupun di luar kecamatan bahkan sampai di luar Provinsi Jambi. Jenis pekerjaan yang digeluti cukup beragam mulai dari menggarap sawah milik petani bugis di Desa Simpang, Rawasari (Kecamatan Rantau Rasau) dan Lambur Luar (Kecamatan Muara Sabak) dengan sistem sewa atau bagi hasil, menjadi buruh pada perkebunan kelapa sawit, sampai menjadi buruh bangunan di kota-kota. Ketiga desa tersebut berada di pinggiran langsung dan tidak jauh dari aliran Sungai Batanghari.

Indikasi lain terjadinya kerusakan lahan adalah perubahan luasan tipologi lahan dan tipe luapan air antara tahun 1993 dan 1998. Bila pada tahun 1993 lahan sulfat masam tidak ditemukan, pada tahun 1998 lahan yang bertipologi sulfat masam mencakup areal seluas 4.234 ha, 2.620 ha diantaranya lahan sulfat masam aktual yaitu lahan sulfat masam yang lapisan piritnya telah teroksidasi dan bagi tanaman hal ini merupakan racun. Lahan gambut (bergambut, dangkal, sedang, dan dalam) yang pada tahun 1993 mencakup areal seluas 6.667 ha, pada tahun 1998 tinggal 1.450 ha. Dari sisi tipe luapan air, lahan yang bertipe luapan A, B, C, dan D masing-masing seluas, 70 ha, 1750 ha, 7.714 ha dan tidak ditemukan (0 ha), pada tahun 1998 masing-masing tidak ditemukan (0 ha), 478 ha, 3546 ha, dan 5.348 ha.

Mulai tahun 2001, 2 responden di Desa Bandar jaya, 4 responden di Desa Bangun Karya, dan 5 responden di Desa Rantau Makmur, dan 2 Responden di desa Rantau Rasau I telah mencoba untuk menanam kembali lahan pangannya. Hasil yang diperoleh 0,72 t/ha/GKG – 1.24 t/ha/ GKG. Hasil ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dalam kurun waktu 3 tahun setelah terjadinya kerusakan lahan. Hal ini menunjukkan, walaupun belum sepenuhnya pulih seperti keadaan semula, paling tidak sudah ada kecendrungan perbaikan kualitas lahan.

Alih fungsi Lahan dan Faktor Penyebabnya

Rendahnya hasil/produksi tanaman pangan (utamanya padi) merupakan refleksi terjadinya penurunan kualitas lahan dan merupakan salah satu alasan terpenting telah dan akan dijadikannya seluruh atau sebagian lahan pangannya menjadi kebun kelapa sawit oleh petani di Empat Desa di Kecamatan Rantau Rasau dan di Tiga Desa di Kecamatan Muara Sabak. Kelima alasan lainnya adalah (1) perawatan kelapa sawit lebih ringan dibandingkan dengan tanaman pangan; (2) untuk meningkatkan taraf hidup (kesejahteraan) keluarganya; (3) lahan pangan petani lain dan tetangga sekitar telah dan akan dijadikan kebun kelapa sawit; (4) hasil dan pendapatan lebih pasti, dan (5) sebagai sumber pendapatan (tabungan) di hari tua. Secara rinci alasan, persepsi dan motivasi petani responden di atas disajikan pada Tabel 1.

Alasan untuk meningkatkan taraf hidup (kesejahteraan) keluarganya dan hasil serta pendapatan kelapa sawit lebih pasti, merupakan dua alasan yang menduduki peringkat kedua yaitu dikemukakan oleh 72 atau 90% responden. Hal ini didasarkan atas penglihatan sendiri maupun mendengar cerita atau informasi dari petani lain bahwa kehidupan petani kelapa sawit seperti di Sungai Bahar dan Petaling Jaya (Kabupaten Muaro Jambi) dan di tempat lain lebih makmur. Indikatornya antara lain: (1) ukuran dan kualitas rumah serta perabotannya lebih baik; (2) kepemilikan alat transportasi dimana setiap rumah minimal memiliki satu buah sepeda motor, dan; (3) mampu membiaya pendidikan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SLTA) bahkan sampai ke Perguruan Tinggi.

Tabel 1. Jumlah dan persentase responden berdasarkan alasan, persepsi dan motivasi petani yang telah dan akan menjadikan seluruh atau sebagian lahan pangannya menjadi kebun kelapa sawit, 2004.

Alasan/Persepsi/Motivasi	Jumlah	Persentase (%)
1. Produksi padi dan tanaman pangan lainnya rendah tidak sebanding dengan korbanan (input dan tenaga kerja) yang dicurahkan	80	100,00
2. Bila dibandingkan dengan tanaman pangan perawatan kelapa sawit lebih ringan	62	77,50
3. Untuk meningkatkan taraf hidup (kesejahteraan) keluarga.	72	90,00
4. Petani lain/tetangga telah dan akan mengalih-lahan pangannya menjadi kebun kelapa sawit	70	87,50
5. Hasil dan pendapatan lebih pasti	72	90,00
6. Sebagai sumber penghasilan (tabungan) di hari tua	60	70,00

Sumber: Data primer diolah (2005)

Keterangan : Setiap responden memberikan 2 – 4 alasan

Pengalaman responden selama ini juga sangat mempengaruhi, selain hanya untuk konsumsi keluarga, pendapatan dari tanaman pangan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, termasuk kebutuhan dasar (primer), walaupun produksinya adalah “cukup” tinggi, disebabkan harga yang diterimanya adalah rendah. Sebagai contoh, pada tahun 2003 harga GKG yang ditawarkan pedagang atau yang diterima petani di tempat hanya berkisar antara Rp 800 – Rp 1.000/kg, sedangkan dalam bentuk beras hanya berkisar antara Rp 1.500,- - Rp 1.800/kg tergantung kualitas. Dengan demikian untuk satu hektar dari satu kali tanam dengan waktu lebih kurang 5 bulan terhitung sejak persiapan hingga panen, penerimaan (pendapatan kotor) yang diterima petani hanya berkisar antara Rp 576.000,- - Rp 1.320.000,-. Bandingkan dengan pendapatan petani plasma kelapa sawit, setelah dipotong angsuran (30 – 35%) dan biaya lain-lain, dari 1 (satu) kavling atau 2 ha, petani memperoleh pendapatan berkisar antara Rp 600.000,- - Rp 800.000,- per bulan (Amri, dkk. 2004). Selain itu, resiko tidak menghasilkan (panen) dari tanaman pangan adalah tinggi. Sedangkan dari tanaman kelapa sawit resiko tidak mendapatkan hasil adalah sangat kecil. Resiko terbesar adalah terjadinya penundaan masa penimbangan terutama pada musim hujan, penundaan masa penimbangan ini adalah identik dengan penundaan pendapatan yang akan mereka terima.

Alasan petani lain/tetangga telah dan akan menjadikan lahan pangannya menjadi kebun kelapa sawit, dipicu kekhawatiran bahwa bila responden tetap mengusahakan lahan pangannya dengan tanaman pangan sedangkan petani lain atau tetangganya telah dan nantinya akan menjadikan lahan pangannya menjadi kebun kelapa sawit, tanaman pangan yang diusahakannya akan menjadi pusat serangan hama dan penyakit. Apalagi bila tanaman kelapa sawit petani lain atau tetangga tersebut baik sebelum maupun setelah menghasilkan tidak dirawat dengan baik akan menjadi tempat yang sangat disenangi oleh beberapa jenis OPT.

Perkiraan Dampak

Dari 80 petani responden yang diwawancarai, yang telah menjadikan seluruh atau sebagian lahan pangannya menjadi kebun kelapa sawit berjumlah 22 atau 27,50% responden, yang baru menyiapkan bibit 24 atau 30,5% responden, yang baru punya rencana 25 atau 31,25% responden, dan yang sementara waktu belum punya rencana hanya berjumlah 9 atau 11,25% responden (Tabel 2). Kesembilan responden yang disebutkan terakhir mempunyai perhitungan atau perkiraan sendiri bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama (≤ 5 tahun) masa jaya kelapa sawit (Harga TBS yang tinggi) akan segera berakhir, selain itu secara spesifik mereka juga memperhitungkan bila semua tanaman kelapa sawit di daerahnya berproduksi akan dihadapkan pada masalah mahal biaya angkut dan terbatasnya sarana dan fasilitas transportasi untuk mengangkut TBS mulai dari kebun sampai ke lokasi pabrik pengolahan (PKS).

Tabel 2. Jumlah responden berdasarkan luas lahan pangannya yang telah dan akan ditanam kelapa sawit di Kecamatan Rantau Rasau dan Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur, 2004.

Status Responden	Responden		Luas lahan	
	Jumlah	Persen (%)	Ha	Persen *)
1. Yang telah menanam	22	27,50	13,80	13,91
2. Yang baru menyiapkan bibit	24	30,00	7,80	7,86
3. Yang baru punya rencana	25	31,25	12,35	12,45
4. Yang sementara belum punya rencana	09	11,25	0,00	0,00

Sumber: Data primer diolah (2005)

Ket: *) dari 99,20 ha total luas lahan pangan responden

Dari tabel 4 di atas, total luas pangan responden yang telah dan akan dijadikan kebun kelapa sawit mencapai 33,95 ha atau 34,22 % dari 99,20 ha. Diperkirakan pada kecamatan-kecamatan lain kondisinya tidak akan jauh berbeda. Dengan asumsi, petani yang baru menyiapkan bibit dan yang baru mempunyai rencana menjadikan seluruh atau sebagian lahan pangannya menjadi kebun kelapa sawit direalisasikan, berarti total produksi padi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sumbangannya terhadap total produksi padi Provinsi Jambi berkurang sebesar 34,22 %.

Di tingkat lapangan, petugas pertanian (utamanya PPL) sebetulnya juga sangat menyayangkan terjadinya alih fungsi lahan tersebut karena akan sangat berpengaruh terhadap total produksi padi dan lebih spesifik dapat menyebabkan kurang tersedianya pangan yang dapat menjadi muara terjadinya kerawanan pangan di wilayah kerjanya. Menghadapi hal di atas petugas pertanian lapangan tersebut tidak bisa berbuat banyak, untuk melarang adalah suatu hal yang tidak dapat mereka lakukan karena akan bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 tentang Budidaya Tanaman, dimana di dalamnya juga memuat kebebasan penuh bagi petani untuk memilih dan menentukan jenis tanaman yang akan diusahakan. Sikap yang mereka ambil adalah menganjurkan tidak, melarangpun tidak. Berkaitan dengan hal tersebut sebaiknya Undang-Undang No. 12 tersebut di tinjau kembali atau perlu direvisi, yang memungkinkan dalam kondisi tertentu Pihak Dinas atau petugas pertanian lapangan dapat mengatur pola pemanfaatan lahan, dengan tetap memprioritaskan petani adalah pihak yang paling diuntungkan.

Selain produksi yang rendah akibat penggunaan benih/bibit yang kurang bermutu dan tidak dilakukannya pemupukkan dengan frekwensi dan dosis yang sesuai dengan yang direkomendasikan. Masalah lain yang diperkirakan akan dihadapi petani kelapa sawit dalam rentang waktu lima tahun kedepan adalah; (1) harga TBS tidak akan lebih bahkan diperkirakan akan turun, bila tidak adanya peningkatan kapasitas pengolahan baik secara horisontal maupun vertikal (Chandra, 2005 *dalam* Kompas 2005a) Secara horisontal adalah penambahan kapasitas pengolahan dari pabrik pengolahan yang ada maupun dengan pendirian pabrik-pabrik pengolahan yang baru, sedangkan secara vertikal adalah pengembangan industri pengolahan hasil yang lebih kehilir; (2) khususnya untuk petani kelapa sawit di daerah pasang surut Tanjung Jabung Timur akan dihadapkan pada masalah mahal biaya angkut dan terbatasnya sarana dan fasilitas angkutan.

Dalam rentang waktu 3 tahun terakhir, harga TBS cukup tinggi. Paling tidak ada dua faktor yang menyebabkannya. Pertama sebagian areal perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Jambi belum berproduksi. Sampai pada tahun 2003 areal perkebunan kelapa sawit yang belum berproduksi mencakup areal seluas 85.570 ha. Dari 241.139 ha areal perkebunan kelapa sawit yang telah berproduksi, TBS yang dihasilkan mencapai 4.340.502 t/th sedangkan total kapasitas TBS terpasang mencapai 4.890.000 t/th. (Disbun Provinsi Jambi, 2004) Dengan demikian terdapat kesenjangan antara kapasitas terpasang dan terpakai dari PKS-PKS yang ada yaitu sebesar 549.498 t/ha. Kedua, sampai pada tahun 2004 telah berdiri dan beroperasinya 5 PKS yang belum memiliki sumber bahan baku sendiri, untuk mendapatkan bahan baku PKS-PKS menawarkan harga Rp 50,-/kg TBS dari harga yang ditetapkan Gubernur (Kompas, 4 Mei 2005).

Pada kondisi tersebut di atas petani berada dalam posisi yang cukup diuntungkan, karena harga TBS yang ditawarkan relatif tinggi, disamping karena terdapatnya kesenjangan antara kapasitas terpasang dengan kapasitas terpakai yang cukup tinggi serta 5 PKS baru yang belum mempunyai sumber bahan baku sendiri, pihak PKS ini untuk sementara waktu akan menerima semua TBS yang ada dengan tidak begitu ketat memperlakukan kriteria (kualitas).

Posisi petani kelapa sawit yang cukup diuntungkan tersebut, dalam rentang waktu lima tahun kedepan secara relatif sulit bertahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) areal perkebunan kelapa sawit yang belum berproduksi pada tiga tahun terakhir, dalam rentang waktu lima tahun kedepan mulai dan atau sepenuhnya akan berproduksi yang diperkirakan produksinya melebihi kapasitas PKS-PKS yang ada; (2) PKS-PKS yang belum atau tidak memiliki sumber bahan baku sendiri (TBS) tidak diperkenankan untuk beroperasi sesuai dengan tenggang waktu yang telah diberikan; (3) industri pengolahan hasil yang lebih kehilir belum berkembang baik, dan (4) situasi pasar sawit internasional yang diperkirakan tidak lebih baik dari 3 (tiga) tahun terakhir, bahkan diperkirakan terjadi kejenuhan akibat produksi sawit dunia yang melimpah (Chandra *dalam* Kompas 2005a).

Untuk tumbuh dan berkembang serta memberikan hasil (produksi) yang optimal tanaman yang dibudidayakan harus memenuhi persyaratan tidak terkecuali kelapa sawit. Persyaratan-persyaratan tersebut diantaranya adalah: (1) benih/bibit yang digunakan adalah yang unggul dan bermutu, (2) pemupukkan yang berimbang, dan; (3) pemupukkan yang berimbang. Normalnya bila menggunakan benih atau bibit bermutu, perawatan yang memadai (minimal) serta pemberian pupuk urea, Sp36, KCl/Mop 2 kali setahun dengan dosis 150 Kg/ha, 150 kg/ha, dan 100 kg/ha per enam bulan serta kapur pertanian 1 kali setahun dengan dosisi 200 kg/ha, produksi yang dapat diperoleh 20 t/ha/th – 25 t/ha/th (Buana 2004).

Disamping sulit, harga benih/bibit bermutu relatif mahal. Sebagai contoh harga benih sawit bermutu pada bulan Desember 2004 yang diproduksi oleh: (1) Pusat Penelitian Perkebunan Kelapa sawit (PPKS) Marihot Medan adalah Rp 2.500,-/kecambah; (2) PT. Sucopindo Rp 4.000,-/kecambah, dan; (3) PT Lonsum Rp 5.850,-/kecambah. Sedangkan harga bibit kelapa sawit yang siap tanam di atas satu tahun berkisar antara Rp 13.000,- - Rp 15.000,- /batang (Kompas, 2005c) dibandingkan dengan harga benih/kecambah yang dibeli petani. Untuk setiap kantong yang berisi

250 kecambah (label) harganya hanya berkisar antara Rp 90.000,- - Rp 110.000,- yang berarti untuk setiap kecambah hanya berkisar antara Rp 360,-/kecambah - Rp 440,-/kecambah dan untuk setiap bibit yang berumur antara 1 - 2 tahun hanya berkisar antara Rp 5.000,- - Rp 8.000,- per batang.

Walaupun harga murah bukan merupakan satu-satunya petunjuk bahwa benih/kecambah atau bibit yang dibeli dan digunakan petani (utamanya petani yang berpola swadaya murni) adalah benih atau bibit yang kurang bermutu, namun untuk kondisi sekarang dimana antara permintaan dan penawaran terdapat kesenjangan yang sangat besar paling sedikit 60 juta benih, maka kemungkinan besar benih atau bibit yang dibeli dan digunakan petani adalah yang kurang bermutu (palsu). Hal ini senada dengan pemberitaan Kompas (2005d) yang menyatakan bahwa dari 340.000 ha kelapa sawit yang ada di Provinsi Jambi pada tahun 2004, 160.000 ha diantaranya diperkirakan menggunakan benih/bibit yang kurang bermutu (palsu). Penggunaan benih/bibit kurang bermutu akan mengakibatkan produksi 50% lebih rendah dan bila tidak atau terlambat melakukan pemupukan, maka produksi pada tahun berikutnya dapat berkurang sampai 50 % (Ariwibowo, S dalam Kompas 2005e dan 2005f). Bila dua faktor ini bekerja secara simultan, maka diperkirakan maksimal produksi TBS yang akan diperoleh 30% - 40% dari produksi normal. Dengan asumsi rata-rata produksi normal adalah 20 t/ha/th TBS, maksimal produksi TBS yang diperoleh 8 t/ha/th, dan dengan rata-rata harga TBS adalah Rp 500,-/kg (maksimal), maka dalam satu tahun pendapatan kotor (belum dikurangi dengan biaya pemeliharaan, angkut dan susut), yang diperoleh dari satu hektar adalah Rp 4.000.000,-

Menurut Suryana (2004) salah satu karakteristik daerah rawa pada umumnya dan pasang surut pada khususnya adalah letaknya relatif terisolasi (terutama secara ekonomi) berada jauh dari pemukiman padat penduduk dan akses transportasi dan komunikasi rendah, dan pembangunan umumnya tertinggal. Dengan karakteristik tersebut angkos pemasaran produk pertanian menjadi mahal yang berarti harga yang diterima petani rendah.

Disamping biaya angkut yang mahal, terbatasnya sarana dan fasilitas transportasi dan ketergantungan pada air pasang yang sangat tinggi menyebabkan mobilitas angkutan (orang dan barang) menjadi sangat terbatas. Hal ini sangat terkait dengan dengan kecepatan pengangkutan TBS dari lokasi/kebun ke tempat pabrik pengolahan, pada hal agar kualitas TBS tidak mengalami penurunan berat dan kualitas yang berarti harga yang ditawarkan pihak pabrik adalah sesuai dengan harga pasar, TBS tersebut dalam jangka waktu kurang dari 24 Jam sudah harus diproses lebih lanjut (Kompas, 2004b)

Untuk saat ini, pengangkutan produk-produk pertanian yang akan dipasarkan (dalam jumlah yang besar) di kota diluar wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, melalui tiga - empat tahap pengangkutan yaitu: (1) dari areal pertanaman ke tempat pengumpulan (pinggira saluran sekunder); (2) dari tempat pengumpulan ke pelabuhan (Simpang Puding dan Muara Sabak); (3) dari pelabuhan bisa langsung menuju lokasi atau tempat transit, dan terakhir; (4) ke pasar konsumen atau ke lokasi pabrik pengolahan. Prosesi pengangkutan tersebut akan lancar bila air sedang naik (pasang) dan cuaca mendukung. Bila surut dan hujan, secara praktis pengangkutan

dari areal pertanaman dan pengumpulan ke pelabuhan terhenti, harus menunggu arus pasang yang siklusnya tidak kurang dari 6 jam. Dengan demikian proses pengkutan TBS dari kebun sampai ke lokasi pabrik pengolahan, peluangnya kurang dari 24 jam adalah rendah.

IV. KESIMPULAN DAN IMPLIKASINYA

1. Antara tahun 1993 – 1998, terjadi penurunan kualitas lahan yang sangat drastis direfleksikan oleh terjadinya perubahan luas lahan berdasarkan tipologi lahan dan tipe luapan air serta produksi padi yang sangat rendah. Penyebabnya adalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada paruh kedua tahun 1997 akibat kemarau panjang dan dipercepat oleh kegiatan pendalman saluran air yang kurang memperhatikan kondisi fisika-kimia tanah secara detail, akibatnya terjadi pengeluaran air (over drain) dari areal pertanaman. Faktor lain yang turut menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lahan adalah: (1) pengolahan lahan yang kurang hati-hati dan tidak berdasarkan konservasi lahan; (2) melakukan pembakaran lahan pada awal musim tanam, dan; (3) terkurasnya unsur hara dalam tanah akibat pemanfaatan yang terus menerus dan berlangsung dalam jangka waktu lama tanpa diimbangi dengan pemberian pupuk.
2. Ada enam alasan yang menyebabkan petani di kecamatan Rantau Rasau dan Muara Sabak yang telah dan akan mengalihkan seluruh atau sebagian lahan pangannya menjadi kebun kelapa sawit. Keenam alasan tersebut adalah: (1) Produksi padi dan tanaman pangan lainnya sangat rendah dan tidak sebanding dengan korbanan (input dan tenaga kerja) yang dicurahkan; (2) perawatan ringan; (3) Untuk meningkatkan taraf hidup (kesejahteraan) keluarga; (4). Petani lain/tetangga telah dan akan menjadikan seluruh atau sebagian lahan pangannya menjadi kebun kelapa sawit; (5). Hasil dan pendapatan lebih pasti; (6) Sebagai sumber penghasilan (tabungan) di hari tua
3. Total luas lahan pangan petani responden di Kecamatan rantau Rasau dan Muara Sabak yang telah dan akan dialihkan menjadi kelapa sawit 33,95 ha atau 34,22% dari 99,20 ha. Dengan asumsi kondisi di kecamatan lain tidak jauh berbeda, maka total produksi padi Kabupaten tanjung Jabung Timur akan berkurang sebanyak 34,22%. Dalam bila data produksi tahun 2003 dijadikan sebagai basis maka maka produksi padi kabupaten ini akan berkurang sebanyak 51.506 ton.
4. Alasan petani di daerah pasang surut umumnya untuk dapat meningkatkan taraf hidup (kesejahteraan keluarga) dengan menjadikan seluruh atau sebagian lahan pangannya menjadi kebun kelapa sawit sulit menjadi kenyataan. Hal ini didasarkan pada perkiraan, mulai dari: (1) produksi yang rendah akibat penggunaan benih/bibit yang kurang bermutu; (2) frekwensi dan dosis pupuk kurang dari yang dianjurkan; (3) situasi perkelapasawitan lima tahun kedepan yang produksinya melimpah dan harga TBS yang tidak lebih baik dari 3 (tiga) tahun terakhir bahkan diperkirakan turun; (4) mahalnnya ongkos angkut, sampai pada; (5) terbatasnya sarana dan fasilitas angkutan. Untuk membantu agar tidak lebih terpuruk, perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan darat dan pelabuhan.

5. Pengalih fungsian lahan pangan menjadi kebun kelapa sawit, adalah hal yang juga disesalkan oleh petugas pertanian lapangan (utamanya PPL). Menghadapi hal tersebut posisinya adalah, menganjurkan tidak melarang tidak. Hal ini terkait dengan UU No. 12 tentang budidaya tanaman yang memberikan kebebasan penuh kepada petani untuk menentukan dan memilih jenis tanaman yang akan diusahakan. UU tersebut diatas perlu di tinjau kembali (amandemen atau revisi) yang memungkinkan petugas lapangan maupun pihak Dinas Pertanian setempat dapat mengatur pola pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi teknis dan ekonomis, dengan tetap memprioritaskan petani adalah pihak yang paling diuntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri. 2004. Preospek pengembangan kelapa sawit di Provinsi Jambi. Lapotan penelitian. Kerjasama antara Bank Indonesia Cabang Jambi dengan Universitas Jambi. Bank Indonesia.
- Alihamisyah, T. Ananto, EE. Supriadi, H. Ahyuni, S. Suhartatik, E. Nugroho, K. dan Sutrisna. 2000. Karakterisasi Wilatyah di Scheme Pamusiran dan Rantau Rasau Wilayah Pengembangan ISDP Provinsi Jambi. Proyek Penelitian Pengembangan Pertanian Lahan rawa Terapdu- ISDP, Bogor.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2001. Proghram Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2001 – 2005. Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muara Sabak.
- Buana, L. 2004. Profil Industri kelapa sawit Indonesia. Dalam tinjauan Ekonomi Industri Kelapa sawit. Pusat penelitian Kelapa sawit (PPKS) Marihat, Medan.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi, 2000. Program Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2001 – 2005. Dinas Pertanian tanaman Pangan Provinsi Jambi, Jambi.
- , 2004. Data Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jambi Tahun 2003. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi, Jambi.
- Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2004. Data Statistik Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2003. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Jambi.
- Djakfar, ZR. 2004. Pengembangan dan Pengelolaan Lahan rawa untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan. Dalam Prosiding Seminar Lokakarya Nasional Hasil Penelitian dan Pengkajian Teknologi Spesifik Lokasi Lokasi, Palembang 28 – 29 Juni 2004. Buku I. Pusat penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Kompas, 2005a. Revitalisasi Industri Kelapa Sawit Nasional. Harian Kompas, 7 Juni 2005. PT. Gramedia, Jakrta.
- , 2005b. Pabrik CPO Tanpa Kebun Menggila di Berbagai Daerah. Harian Kompas, 4 Mei 2005.
- , 2005c. Indonesia Harus Jadi Produser CPO Terbesar. Harian Kompas, 29 Januari 2005. PT. Gramedia jakarta.
- , 2005d. Harga Benih Unggul Mahal. Harian Kompas, 22 Pebruari 2005. PT. Gramedia, Jakarta.
- , 2005e. Permintaan Tinggi Picu Pemalsuan Bibit Kelapa Sawit. Harian Kompas, 4 Pebruari 2005. PT. Gramedia, Jakarta..

- , 2005f. Bibit Kelapa sawit Palsu Makin Meresahkan di Jambi. *Harian Kompas*, Tanggal .4 Mei 2005 PT. Gramedia, Jakarta.
- , 2005g. Kelapa sawit di Provinsi Jambi Kurang Pupuk. *Harian Kompas*, 10 Maret 2005. PT. Gramedia, Jakarta.
- Manwan, I. Ismail, IG. Alihamsyah, T dan Partoharjono, S. 1992. Teknologi Untuk Pengembangan Pertanian Lahan Rawa Pasang Surut. ***Dalam*** Risalah Pertemuan Nasional Pengembangan Pertanian Lahan rawa Pasang Surut dan Lebak, Cisarua, 3 – 4 Maret 1992. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan, Bogor.
- Saliem, HP. Lokalllo, EM. Ariani, M. Purwantini, TB dan Marisa, Y. 2001. Analisis Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga dan Regional . ***Laporan Hasil Penelitian***. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Setyorini, D. 2002. Uji Tanah Untuk Pemupukkan Berimbang Spesifik Lokasi ***dalam*** Warta penelitian dan Pengembangan Pertanian, Vol. 24 No.2. Badan penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- Suryana, A. 2004. Peranan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Lahan Rawa Mendukung Pembangunan Agribisnis Wilayah. ***Dalam*** Prosiding Seminar Lokakarya Hasil Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi, Palembang 28 – 29 Juni. Buku I. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Widjaya-Adhi, IPG. K. Nugroho., dan A. Syarifuddin Karama. 1992. Sumber Daya Lahan: **Potensi, Keterbatasan dan Pemanfaatan**. ***Dalam*** Risalah Pertemuan Nasional Pengembangan Pertanian Lahan rawa Pasang Surut dan Lebak, Cisarua, 3 – 4 Maret 1992. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan, Bogor.